

Indonesia: Pekerjaan Rumahan di Jawa Timur - Temuan dari penelitian kualitatif

Apa itu pekerjaan rumahan?

Banyak orang di Indonesia bekerja dalam hubungan kerja tak standar. Pekerja rumahan merupakan salah satu kelompok pekerja semacam itu. Pekerja rumahan seringkali dikelirukan dengan wiraswasta atau pekerja rumah tangga, namun, mereka adalah pekerja yang melaksanakan pekerjaan di rumah mereka untuk mendapatkan upah yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana ditentukan oleh pemberi kerja. Di Indonesia, para pekerja ini biasanya menerima bahan baku dari perantara dan bekerja berdasarkan upah satuan untuk memproduksi produk di rumah mereka sendiri. Mereka seringkali bekerja berjam-jam untuk mendapat upah rendah dan menghadapi pekerjaan yang kurang layak. Karena sebagian besar pekerja rumahan bekerja di rumah mereka sendiri, mereka kurang mendapatkan pengakuan dan kurang memiliki suara, dan sumbangsih yang mereka berikan pada pengembangan ekonomi dan sosial keluarga dan masyarakat mereka seringkali tetap tak terlihat.

Karena tak banyak yang diketahui tentang pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja rumahan, ikhtisar ini menyajikan temuan dari penelitian kualitatif tentang pekerjaan rumahan di Jawa Timur. Bukti kualitatif menunjukkan peningkatan pekerjaan rumahan di Indonesia dari waktu ke waktu, dan kecenderungan ini bertepatan dengan meningkatnya fleksibilisasi pasar tenaga kerja, eksternalisasi proses produksi dan tingginya tingkat pekerjaan di sektor informal. Ikhtisar ini berbagi Informasi tentang hambatan utama untuk perlindungan

pekerja rumahan dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses pekerja rumahan ke pekerjaan layak. Temuan ini menyoroti perlunya memperbaiki kondisi kerja perempuan, khususnya melalui peningkatan organisasi dan meningkatkan akses ke perlindungan sosial.

Kotak 1: Di dalam proyek MAMPU ILO

MAMPU – Akses ke Ketenagakerjaan dan Pekerjaan Layak adalah sebuah proyek ILO yang fokus pada peningkatan akses perempuan ke ketenagakerjaan, terutama untuk pekerja rumahan. Proyek ini dibiayai oleh Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan - MAMPU dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan dilaksanakan di Sumatera Utara dan di Pulau Jawa.

Proyek ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kondisi kerja pekerja rumahan dan mendukung transisi mereka dari ketenagakerjaan informal ke formal. Proyek ini bekerja dengan serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan organisasi masyarakat sipil untuk mengalihkan pengetahuan dan membangun kapasitas pekerja rumahan untuk meningkatkan kondisi kerja mereka. Proyek ini juga bekerja dengan pemerintah untuk membangun kapasitas untuk pengembangan kebijakan, program dan peraturan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan pasar tenaga kerja. Guna untuk mendukung tujuan proyek dan secara efektif mengadvokasi pekerjaan layak untuk pekerja rumahan, maka penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kondisi kerja para pekerja ini melalui pelaksanaan penelitian dan berbagi temuan dengan para pemangku kepentingan utama di pasar tenaga kerja.

Gambar: Seorang perempuan memasang senar badminton di Jawa Timur



Sumber: ILO (2014)

Wawasan kualitatif dalam pekerjaan rumahan

Guna untuk menjelaskan kondisi kerja pekerja rumahan di Indonesia, ILO melaksanakan penelitian yang melibatkan 233 pekerja rumahan di Jawa Timur (29 laki-laki, 204 perempuan) pada tahun 2013. Survei tersebut mewawancarai pekerja rumahan dari kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, dan kota Surabaya di Jawa Timur. Mengingat baru sedikit yang diketahui tentang karakteristik pekerjaan rumahan di Indonesia, maka digunakanlah

metode penelitian tindakan (*action research*).¹ Penelitian ini dilaksanakan bersama dengan LSM-LSM dan kelompok-kelompok advokasi lokal yang aktif di daerah yang disurvei di Jawa Timur.

Penelitian tindakan dapat dikonseptualisasikan sebagai alat metodologis yang dinamis, yang menyangkut belajar tentang pekerja rumahan, sementara juga memberitahu mereka tentang hak-hak mereka. Proses penelitian ini mengidentifikasi isu-isu kunci di sekitar mana pekerja rumahan dapat diorganisir dan dilibatkan dalam aksi bersama untuk mewujudkan hak-hak mereka di tempat kerja. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mengumpulkan informasi guna untuk mengadvokasi hak-hak pekerja rumahan dan untuk mendukung organisasi pekerja rumahan. Lebih khusus, penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan informasi di bidang-bidang berikut:

1. Karakteristik pekerja rumahan;
2. Hubungan kerja pekerja rumahan;
3. Kondisi kerja pekerja rumahan;
4. Organisasi pekerja rumahan;
5. Prioritas pekerja rumahan.

Peserta penelitian mengisi sebuah kuesioner dengan 81 variabel. Pertanyaan difokuskan pada pemahaman profil pekerja rumahan dalam berbagai variabel, meliputi antara lain jam kerja, pengupahan, pelatihan dan jenis kontrak. Penelitian juga difokuskan pada pemahaman sikap dan persepsi dalam berbagai variabel, meliputi hubungan dengan pemberi kerja, dinamika pengambilan keputusan rumah tangga dan hubungan gender di dunia kerja.

Kotak 2: Siapakah pekerja rumahan?

Pasal 1 Konvensi ILO tentang Pekerjaan Rumah, 1996 (No. 177) mendefinisikan pekerjaan rumahan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang, yaitu pekerja rumahan, yang bekerja:

- di rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja;
- untuk mendapatkan upah ;
- yang menghasilkan produk atau jasa sebagaimana ditentukan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan;

Kecuali orang ini memiliki tingkat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri.

Profil demografis sampel

Peserta penelitian tahun 2013 di Jawa Timur sebagian besar adalah perempuan, yang bergulat antara tanggung jawab rumah tangga penuh waktu dengan pekerjaan rumahan. Sebagian besar orang yang diwawancarai sudah menikah

(94,3 persen). Banyak responden yang memiliki anak kecil dan karena pembagian tugas dalam rumah tangga yang bias gender, dan kurangnya akses ke fasilitas penitipan anak, maka mereka mengalami kesulitan dalam mengakses pekerjaan di luar rumah.

Banyak responden juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian besar perempuan yang diwawancarai berada dalam usia kerja utama (30-44 tahun), dan dengan demikian dibesarkan di era sebelum transisi demokrasi dan reformasi kebijakan pendidikan. Dibandingkan dengan Indonesia saat ini, para perempuan ini terbatas aksesnya ke peluang pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk berkembang menjadi pekerja terampil.

Kotak 3: Partisipasi angkatan kerja perempuan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial

Keputusan tentang dan kemampuan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja terkait dengan berbagai faktor ekonomi dan sosial yang bersinggungan secara kompleks baik di dalam rumah tangga maupun di dunia kerja. Di Indonesia, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sangat rendah, berkisar antara 50 hingga 53 persen selama empat tahun terakhir. Ini membuat sebagian besar perempuan berada di luar dunia kerja. Tingginya kejadian perempuan tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja sebagian besar disebabkan karena tanggung jawab rumah tangga, di mana banyak perempuan melaporkan sepenuhnya berputut dengan kegiatan rumah tangga. Situasi ini menyoroti persepsi tentang peran gender dan tidak setaranya pembagian tanggung jawab rumah tangga antara perempuan dan laki-laki. Ini juga mencerminkan terbatasnya akses ke layanan penitipan anak dan kurang fleksibelnya pengaturan waktu kerja yang diperlukan untuk mendukung partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini maka kita bisa menyaksikan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dan juga menyaksikan perbaikan dalam kesetaraan gender.

Analisis kecenderungan dari waktu ke waktu mengungkapkan adanya kecenderungan yang mengganggu, yaitu perempuan berganti-ganti antara tidak berada di dalam angkatan kerja karena "tugas rumah tangga" dan memasuki angkatan kerja sebagai "pekerja keluarga tidak dibayar" di sektor pertanian atau perdagangan sepanjang tahun. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan dan memiliki keterikatan dengan pasar tenaga kerja yang relatif lemah, karena tanggung jawab rumah tangga dan kesulitan dalam beralih dari pekerjaan di dalam rumah tangga ke dunia kerja di luar rumah tangga.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mendukung perempuan untuk menjaga keterikatan dengan pasar tenaga kerja, melalui penyediaan cuti hamil, tempat penitipan anak dan pengaturan waktu kerja yang fleksibel, serta program-program untuk mendukung perempuan untuk meningkatkan kualifikasi mereka dan akses ke pekerjaan di luar pertanian; untuk mengatasi masalah struktural terkait dengan hasil (outcome) perempuan dalam pasar tenaga kerja di Indonesia. Advokasi untuk kesetaraan gender juga diperlukan. Kemajuan di bidang ini akan menjadi faktor kunci untuk membuka potensi angkatan kerja Indonesia produktif ini di masa depan.

Sumber: ILO (2015) Labour and social trends in Indonesia 2014: Strengthening competitiveness and productivity through decent work, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Jakarta.

1 Diadaptasi dari HomeNet (2001) *Guide to action research with home-based workers*, Mimeo, HomeNet Office; Leeds.

Temuan: Pengaturan waktu kerja fleksibel

Pekerja rumahan menawarkan jam kerja yang fleksibel, yang memungkinkan perempuan untuk menyeimbangkan kewajiban mereka di dalam rumah tangga dengan tanggung jawab ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa pekerja rumahan di Jawa Timur pada umumnya menjadwalkan pekerjaan mereka saat jam sekolah anak-anak mereka atau melaksanakan pekerjaan rumahan pada sore atau malam hari.

Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa pekerja rumahan memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka dan seringkali melaksanakan pekerjaan rumahan untuk membayar biaya yang terkait dengan kesejahteraan anak-anak mereka, misalnya pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menemukan bahwa anak-anak dari pekerja rumahan seringkali memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari pada pekerja rumahan itu sendiri. Ini menyoroti bahwa pekerjaan rumahan merupakan pilihan yang penting, dan seringkali satu-satunya, bagi keluarga untuk meningkatkan modal manusia mereka dan menghindari penerusan kemiskinan antar generasi.

Temuan: Sumber pendapatan lebih dari satu

Mayoritas responden melaporkan memiliki pekerjaan lebih dari satu serta pemberi kerja lebih dari satu. Misalnya, responden melaporkan bahwa mereka mungkin terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dan peternakan atau bekerja untuk bisnis lokal di desa mereka di samping melaksanakan pekerjaan rumahan. Atau, beberapa responden melaporkan melaksanakan pekerjaan rumahan dari pemberi kerja dan perantara lebih dari satu. Situasi ini menyoroti kerawanan pekerjaan rumahan, dengan penelitian internasional yang menyoroti bahwa orang yang memiliki pekerjaan lebih dari satu cenderung mendapatkan penghasilan lebih kecil dari pada orang dengan satu pekerjaan, bahkan setelah semua sumber pendapatan dijumlahkan.²

Ini menegaskan beban ganda, dengan pekerja rumahan perempuan melaksanakan bagian terbesar dari tugas dalam rumah tangga dan juga melaksanakan pekerjaan berbayar, seringkali dengan pemberi kerja lebih dari satu, untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Temuan: Upah rendah

Temuan dari penelitian di Jawa Timur menunjukkan bahwa pekerjaan rumahan sebagian besar diberi imbalan secara per satuan. Bila diubah ke besaran upah berdasar waktu, pekerja rumahan kemungkinan besar akan mendapatkan antara Rp. 600 dan Rp. 6.500 per jam. Ini berarti bahwa banyak pekerja rumahan memperoleh upah di bawah upah minimum, meskipun bekerja berjam-jam.

Pekerjaan rumahan juga disubsidi oleh tenaga kerja tidak dibayar, dengan pekerja rumahan seringkali mendapatkan bantuan tanpa bayaran dari keluarga dan teman-teman dalam menyelesaikan pesanan. Selain itu, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja rumahan biasanya tidak mendapatkan kompensasi dari pemberi kerja untuk biaya terkait pekerjaan dan oleh karena itu memiliki beban membiayai sendiri sebagian besar produksi. Contoh biaya semacam itu antara lain listrik, air dan sewa tempat. Ada juga kasus di mana pekerja rumahan diberi sanksi atas produk yang rusak atau berkualitas rendah.

Kotak 4. Pengambilan keputusan rumah tangga

Di dalam rumah tangga pekerja rumahan yang disurvei, ditemukan bahwa suami pekerja rumahan pada umumnya lebih memiliki kekuasaan pengambilan keputusan di rumah tangga dari pada responden itu sendiri. Misalnya, kewenangan pengambilan keputusan dalam keputusan-keputusan seperti anak akan bersekolah di mana, konsumsi barang dan jasa, dan apakah akan punya anak atau tidak, pada umumnya diambil oleh suami pekerja rumahan. Pengambilan keputusan cenderung untuk diambil bersama pada masalah-masalah seperti izin mencari kerja dan apakah tabungan pribadi akan dihemat atau dibelanjakan.

Temuan dari penelitian Jawa Timur menunjukkan bahwa pekerja rumahan yang memiliki otoritas pengambilan keputusan lebih besar di dalam rumah tangga juga lebih mungkin untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja tentang ketentuan-ketentuan pekerjaan, kondisi kerja dan besaran upah. Temuan ini menunjukkan bahwa mempromosikan kesetaraan gender di dalam rumah tangga dapat menjadi kunci untuk meningkatkan mata pencaharian dan kondisi kerja pekerja rumahan.

Temuan: Pengaturan kerja informal

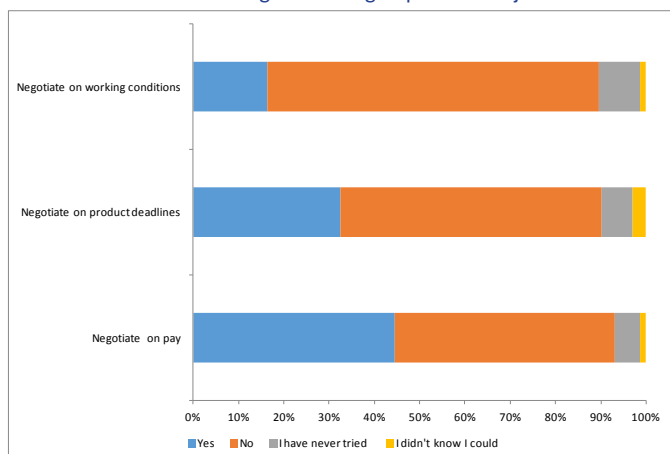
Penelitian ini menemukan bahwa ada banyak faktor yang membuat pekerja rumahan rentan terhadap eksploitasi, misalnya kurangnya peraturan, kurangnya pengakuan, kurangnya suara dan perwakilan, isolasi dari pekerja lain dan tidak adanya kontrak tertulis. Mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini pada umumnya bekerja dalam pengaturan kerja informal dengan pemberi kerjanya, dengan 41,4 persen responden melaporkan memiliki perjanjian lisan dan 44,2 persen menyatakan bahwa mereka 'tidak tahu' jenis perjanjian yang mereka miliki dengan pemberi kerja.

Karena tidak adanya perjanjian kontrak formal, responden melaporkan bahwa mereka tidak tahu jangka waktu perjanjian kerja mereka (70,9 persen) atau melaporkan bahwa kontrak kerja mereka tidak memiliki jangka waktu yang pasti (29,1 persen). Sifat informal hubungan kerja antara pekerja rumahan dan perantara atau perusahaan membuat pekerja rumahan hanya memiliki lingkup yang sangat terbatas untuk menegosiasikan ketentuan perjanjian kerja mereka. Sehubungan dengan ini, penelitian ini menemukan bahwa pekerja rumahan tidak berkemungkinan untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja mereka tentang ketentuan kerja,

2 Banerjee, A. dan Duflo, E. (2007) The Economic Lives of the Poor, Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, vol. 21(1), hlm. 141-168, Winter.

besaran upah, kondisi kerja atau tenggat waktu produk (Lihat gambar di bawah).

Gambar: Negosiasi dengan pemberi kerja



Sumber: Data pribadi penulis

Selain itu, karena pekerjaan rumahan di Indonesia adalah fitur dari ekonomi informal, banyak pekerja rumahan tidak menganggap kegiatan yang mereka laksanakan sebagai suatu bentuk kerja. Justru mereka mungkin menyebut pekerjaan rumahan sebagai kegiatan lepas yang menghasilkan pendapatan atau bahkan hobi. Namun, pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja rumahan merupakan bagian integral dari rantai pasokan di tingkat lokal, nasional dan global.

Temuan: Pengawasan kerja produksi

Ketika terlibat dalam pekerjaan rumahan, mayoritas responden melaporkan terlibat dalam pekerjaan produksi dasar. Misalnya, 10,7 persen responden mengurutkan tiket lotre kertas, 9,0 persen menjahit sandal atau memberi payet pada sandal. Sejumlah responden membuat gelang dan aksesoris, atau mengelem mainan kardus. Para responden dalam penelitian ini melaporkan bahwa mereka menggunakan perpaduan antara mesin dan peralatan mereka sendiri, serta mesin dan peralatan dari pemberi kerja untuk mengerjakan pekerjaan mereka.

Tidak seperti pekerjaan di negara lain, penelitian ini menemukan bahwa banyak pekerja rumahan yang diwawancarai di Jawa Timur menerima perintah kerja langsung dari pabrik yang mempekerjakan mereka, alih-alih dari perantara.³ Lebih jauh, pekerja rumahan yang diwawancarai dalam penelitian ini cenderung mengetahui perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, responden melaporkan bahwa mereka bekerja sesuai dengan spesifikasi dan tenggat waktu dari pemberi kerja. Mereka bekerja dengan besaran upah satuan dan upah bisa dipotong jika pekerjaan tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Bila karakteristik ini digabungkan, mereka bisa dianggap menjadi bentuk tidak langsung dari pengawasan.⁴

3 Mehrotra, S. and Biggeri, M. (eds) (2007) Asian Informal Workers: Global risks, local protection, Routledge, London.

4 Fajerman, M. (2013) Review of the Regulatory Framework for the Homeworkers in Indonesia, International Labour Organization, Jakarta.

Dalam undang-undang ketenagakerjaan Indonesia ada tiga unsur umum sebuah hubungan kerja,⁵ yaitu, pekerjaan yang ditetapkan, pengupahan dan tingkat subordinasi. Unsur-unsur ini menentukan adanya hubungan kerja antara pekerja (termasuk pekerja rumahan) dan pemberi kerja mereka berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia. Menurut definisi ini, pekerja dapat melaksanakan kegiatan mereka di dalam atau di luar perusahaan. Berdasarkan definisi dan karakteristik pekerjaan rumahan di atas, maka sebuah argumen dapat dibuat mengenai keberadaan hubungan kerja antara pekerja rumahan dan pengusaha.

Temuan: Pelatihan meningkatkan kondisi

Sebagian besar pekerja rumahan yang berpartisipasi dalam penelitian ini (76,5 persen) melaporkan bahwa mereka tidak pernah menerima pelatihan dari pemberi kerja mereka untuk menghindari kecelakaan, cedera atau masalah kesehatan di tempat kerja. Namun, banyak responden (80,4 persen) melaporkan bahwa mereka telah menerima pelatihan kesehatan dan keselamatan dari sumber-sumber lain. Sumber pelatihan yang paling sering adalah dari pekerja rumahan lain (44,8 persen), diikuti dengan pelatihan dari LSM (21,7 persen), sementara hanya sedikit responden melaporkan telah menerima pelatihan dari serikat pekerja (13,9 persen).

Perlu dicatat bahwa pekerja rumahan yang dilatih oleh pemberi kerjanya tentang pembuatan produk dan kesehatan dan keselamatan kerja melaporkan kejadian kesalahan lebih rendah dan tingkat efisiensi lebih tinggi dalam penyelesaian tugas. Ini menyoroti bahwa investasi perusahaan dalam pengembangan keterampilan dan kesejahteraan pekerja rumahan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Temuan: Sangat kurangnya organisasi dan perlindungan

Karena pekerja rumahan bekerja di dalam ruang pribadi rumah mereka, mereka menghadapi hambatan yang signifikan untuk bergabung dengan organisasi pekerja. Namun, sebagian kecil dari sampel (1,7 persen) terkait dengan serikat pekerja. Ditemukan bahwa para pekerja rumahan ini lebih berkemungkinan mendapatkan kompensasi untuk cedera terkait pekerjaan dari pemberi kerja mereka dibandingkan pekerja rumahan lain. Selain itu, pekerja rumahan yang memiliki kaitan dengan organisasi pekerja lebih mungkin untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja dan memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka di tempat kerja. Temuan ini menyoroti pentingnya menghubungkan pekerja rumahan dengan organisasi pekerja dan kelompok advokasi terkait untuk mendukung perbaikan kondisi kerja mereka.

Pekerja rumahan yang disurvei dalam penelitian ini tidak berkemungkinan menerima manfaat kesehatan dari pemberi

5 Undang-undang Ketenagakerjaan, UU No.13 of 2003, pasal 1(15).

kerja mereka, misalnya kompensasi untuk biaya medis dan cuti sakit. Namun, hampir semua pekerja melaporkan tercakup dalam program sosial pemerintah misalnya bantuan tunai bersyarat, perawatan kesehatan dasar atau “beras untuk orang miskin”. Pekerja rumahan yang telah bekerja dengan pemberi kerja yang sama untuk jangka waktu yang lama lebih berkemungkinan untuk dihubungkan dengan program perawatan kesehatan dasar. Meskipun ini positif, tetapi penting untuk menyoroti bahwa responden tidak memiliki akses ke perlindungan kehamilan, skema pensiun atau pesangon seperti yang dinikmati oleh pekerja dengan kontrak resmi.

Gambar: Seorang laki-laki membuat sandal di Jawa Timur



Source: ILO (2014)

Rekomendasi

Survei pekerja rumahan di Jawa Timur menyoroti bahwa pekerjaan rumahan ditandai dengan pengaturan informal, upah rendah, jam kerja panjang, daya tawar lemah atau tidak ada, dan perlindungan sosial sedikit atau tidak ada. Pekerjaan rumahan merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak perempuan yang tidak memiliki peluang sumber pendapatan lain, dan pekerja rumahan memberi sumbangsih penting untuk kesejahteraan keluarga mereka serta pembangunan ekonomi di Indonesia. Promosi pekerjaan layak untuk pekerja rumahan merupakan bidang kerja penting dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Meningkatkan kondisi kerja mereka juga dapat memiliki dampak positif saat Indonesia berupaya melakukan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya ini, rekomendasi-rekomendasi berikut diberikan dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh pekerja rumahan dan berdasarkan pengalaman internasional:

1. Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja rumahan

Keberadaan pekerja rumahan dan tantangan-tantangan khusus yang mereka hadapi tetap sebagian besar tidak terlihat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran tentang hak-hak pekerja rumahan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional dan di kalangan semua pemangku kepentingan termasuk pekerja rumahan sendiri, pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja diperlukan. Penting juga meningkatkan kesadaran tentang perbedaan antara pekerja berbasis rumahan mandiri dan pekerja

berbasis rumahan yang bergantung pada pihak lain, karena mempromosikan pekerjaan layak bagi kelompok-kelompok ini membutuhkan pendekatan yang berbeda.

2. Mengakui pekerja rumahan sebagai pekerja melalui penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pekerja rumahan

Sebagai satu langkah untuk memberikan perlindungan yang efektif pada pekerja rumahan, kebijakan tentang pekerjaan rumahan harus disusun dan diterapkan dengan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk perwakilan pekerja rumahan. Konvensi ILO tentang Pekerjaan Rumahan tahun 1996 (No. 177) yang belum diratifikasi oleh Indonesia, dan Rekomendasi Pekerjaan Rumah, 1996 (No. 184) memberikan prinsip-prinsip dasar dan pedoman dalam mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumahan.

3. Memperluas perlindungan sosial pada pekerja rumahan

Banyak pekerja rumahan mendapatkan upah di bawah upah minimum, meskipun bekerja berjam-jam. Ini berarti bahwa gangguan dalam pekerjaan dan penghasilan mereka karena sakit atau cedera meningkatkan risiko mereka untuk jatuh ke dalam kemiskinan. Memastikan bahwa pekerja rumahan memiliki akses ke layanan sosial penting, misalnya kesehatan, dapat mengurangi risiko semacam itu, dan juga dapat berkontribusi meningkatkan produktivitas. Implementasi perlindungan sosial bagi pekerja rumahan secara progresif dan bertahap juga bisa memberi contoh yang baik untuk memperluas perlindungan sosial pada pekerja-pekerja lain dalam perekonomian informal di Indonesia di mana terdapat angka kejadian yang tinggi untuk pekerjaan informal.

4. Memberdayakan pekerja rumahan untuk menangani kurangnya pekerjaan layak

Sebagian besar pekerja rumahan adalah perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Ini berarti bahwa mereka memiliki pengetahuan dan akses informasi yang terbatas untuk meningkatkan kondisi kerja mereka. Karena mereka bekerja dalam isolasi dari pekerja lain, maka sebagian besar dari mereka tidak terorganisir dan kurang memiliki keterwakilan, suara dan daya tawar. Agar pekerja rumahan dapat meningkatkan suara dan keterwakilan mereka dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi kerja mereka, pekerja rumahan perempuan harus didukung dalam bidang-bidang berikut:

- Pelatihan pekerja rumahan tentang berbagai topik yang relevan seperti kesetaraan gender, hak-hak pekerja, advokasi, pengorganisasian, keselamatan dan kesehatan kerja, melek keuangan, dan kepemimpinan, untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka dan meningkatkan kondisi kerja mereka.
- Promosi kesetaraan gender di dalam rumah tangga maupun di masyarakat untuk mendukung pemberdayaan perempuan yang sebagian besar melakukan pekerjaan rumahan.
- Memperluas akses pekerja rumahan ke pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja mereka di luar pekerjaan rumahan.
- Organisasi pekerja rumahan, dan pembentukan, penguatan dan pengelolaan kelompok dan jaringan pekerja rumahan.

5. Membangun kapasitas organisasi pekerja dan organisasi yang mendukung pekerja rumahan

Memperluas perlindungan pada pekerja rumahan masih merupakan tantangan terutama karena pekerja rumahan terisolasi dan tidak terorganisir. Namun, organisasi pekerja dapat memainkan peran kunci dalam mendukung pekerja rumahan untuk berorganisasi dan untuk lebih berpartisipasi dalam dialog kebijakan nasional. Menghubungkan pekerja rumahan dengan organisasi pekerja, dan kelompok-kelompok lain yang relevan, berkemungkinan akan memberdayakan pekerja rumahan dan membantu meningkatkan kondisi kerja mereka. Dalam hal ini, diperlukan penguatan kapasitas organisasi pekerja untuk mengorganisir pekerja di sektor informal seperti pekerja rumahan.

6. Mempromosikan praktik-praktik yang bertanggung-jawab oleh pemberi kerja dan pembeli dalam mempekerjakan pekerja rumahan

Asosiasi pengusaha di Indonesia dapat memainkan peran kunci dalam mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumahan dengan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu pekerja rumahan dan mempromosikan praktik yang bertanggung jawab untuk mempekerjakan pekerja rumahan. Dengan globalisasi dan meningkatnya fleksibilisasi pasar tenaga kerja, maka rantai nilai menjadi kompleks dan semakin sulit untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang proses produksi. Namun, pekerja rumahan seringkali dapat didapati bekerja di bagian terbawah dalam rantai nilai, membuat produk yang dijual secara lokal, nasional dan internasional. Memastikan bahwa pekerja yang terlibat dalam rantai nilai memiliki kondisi kerja yang layak merupakan praktik baik serta tanggung jawab sosial dari pemberi kerja dan pembeli. Selain upaya oleh asosiasi pengusaha, beberapa tindakan yang dapat diambil oleh pengusaha dan pembeli secara perorangan untuk mempromosikan pekerjaan layak adalah sebagai berikut:

- Mengambil peran proaktif dalam mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumahan dengan secara rutin menilai dan mengidentifikasi kondisi kerja pekerja rumahan yang terlibat dalam rantai nilai mereka dan menerapkan langkah-langkah responsif.
- Melatih pekerja rumahan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, serta keterampilan yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa.
- Mengembangkan mekanisme untuk memantau kondisi kerja dari pekerja rumahan yang terlibat dalam rantai nilai mereka.
- Melatih orang-orang yang terlibat dalam rantai nilai tersebut misalnya perantara tentang pekerjaan layak bagi pekerja rumahan.
- Mempromosikan kesetaraan gender dan non-diskriminasi di tempat kerja dan di seluruh rantai nilai.

Seperti ditunjukkan oleh penelitian ini, investasi oleh pemberi kerja dan pembeli dalam mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumahan akan memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan mereka karena pekerja akan meningkatkan produktivitas dan perusahaan akan memiliki citra yang baik sebagai pemberi kerja/pembeli yang bertanggung-jawab secara sosial.

7. Mengumpulkan data tentang pekerja rumahan

Diperlukan juga data untuk lebih memahami angka kejadian (*prevalence*) dan kondisi kerja pekerja rumahan, dan untuk mengembangkan argumentasi yang kuat agar bisa lebih menghargai sumbangsih yang sangat besar yang telah diberikan para perempuan Indonesia berpenghasilan rendah terhadap pengembangan ekonomi dan sosial keluarga, komunitas dan masyarakat mereka. Kemajuan di bidang ini akan menjadi kunci untuk mengembangkan kebijakan dan program yang tepat untuk pemberdayaan perempuan, yang selanjutnya membuka potensi produktif mereka.

8. Membuat mekanisme untuk menetapkan besaran upah per satuan

Besaran upah merupakan masalah terpenting yang diidentifikasi oleh pekerja rumahan. Sebagian besar pekerja rumahan yang disurvei di Jawa Timur melaporkan menerima upah di bawah standar, jauh di bawah upah minimum lokal, meskipun bekerja empat puluh jam atau lebih dalam seminggu. Dalam konteks ini, pembuatan mekanisme yang jelas untuk menetapkan besaran per satuan dalam konteks pekerjaan rumahan harus dipertimbangkan. Berbagai metode untuk menghitung besaran upah per satuan sudah ada dan bisa diadaptasi untuk pekerjaan rumahan, dan perwakilan pekerja rumahan dan perwakilan pengusaha harus terlibat di seluruh proses tersebut. Besaran upah per satuan dapat juga ditetapkan melalui proses negosiasi dan perundingan bersama antara organisasi pekerja rumahan dan pengusaha. Memiliki besaran upah per satuan yang disepakati dapat melindungi pekerja rumahan dari perlakuan yang tidak adil dan eksploitasi, dan juga memberikan sumbangsih menghapuskan persaingan tidak sehat antar pengusaha.

9. Menangani kendala dan mempromosikan akses perempuan ke pekerjaan layak

Selain itu, kebijakan dan program yang peka gender yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender diperlukan untuk memperkuat keseluruhan posisi perempuan di dunia kerja. Bidang-bidang tindakan kunci meliputi:

- Mempromosikan lingkungan yang kondusif untuk rekonsiliasi pekerjaan dan keluarga: misalnya membangun fasilitas penitipan anak, menerapkan pengaturan waktu kerja yang fleksibel, dll.
- Meningkatkan akses perempuan ke pelatihan untuk meningkatkan daya kerja.
- Meningkatkan akses perempuan ke perlindungan jaminan sosial.
- Memperkuat perlindungan terhadap diskriminasi jenis kelamin dan kekerasan di tempat kerja.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi

Aya Matsuura (matsuura@ilo.org)
Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22,
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 - Jakarta 10250
Telp. +62 21 391 3112;
Faks. +62 21 310 0766
Email: jakarta@ilo.org;
Website: www.ilo.org/jakarta